

**PENGARUH PEMBIAYAAN PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN  
DAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS KUALITAS MANUSIA SERTA  
PERTUMBUHAN EKONOMI PADA KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI  
TAHUN 2011-2015**

**I Gede Komang Angga Dianaputra<sup>1</sup>  
Luh Putu Aswitari<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia  
e-mail: anggadianaputra@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks kualitas manusia serta pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sedangkan metode analisis yang digunakan yaitu analisis jalur atau *path analysis*. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks kualitas manusia. Pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Indeks kualitas manusia memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indeks kualitas manusia. Pengaruh tidak langsung tersebut ditunjukkan dengan variabel indeks kualitas manusia merupakan sebagai variabel intervening.

**Kata kunci:** *Pembiayaan Pemerintah di Sektor Pendidikan, Pembiayaan Pemerintah di Sektor Kesehatan, Indeks Kualitas Manusia, Pertumbuhan Ekonomi*

**ABSTRACT**

*This research was to analyze the influence of government financing in the education and health sectors against the index of the quality of human as well as economic growth. This research was conducted in the whole district/municipality in the province of Bali. The data used in this research is secondary data, whereas the methods of analysis used i.e. path analysis. Based on the results of the analysis it was found that government financing in the education and health sector a positive and significant effect against the human quality indices. Government financing in the education and health sector have a significant and positive influence toward economic growth. Human quality indices have a significant and positive influence toward economic growth. Government financing in the education and health sectors have influence indirectly against economic growth through the index of the quality of human beings. The indirect influence is indicated by the variable index of human qualities is intervening as variables.*

**Keywords:** *Government financing in the education sector, government financing in the health sector, the human quality indices, economic growth*

## **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan yang sangat diharapkan bagi suatu negara ataupun daerah. Pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana PDRB menggambarkan pergerakan aktivitas perekonomian pada suatu daerah yang dapat dicapai dalam satu periode. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2000).

Menurut Dewi, dkk. (2017) Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui PDRB atau PDRB per kapita pada masing-masing daerah. bilamana PDRB dibagi dengan jumlah penduduk di daerah tertentu, maka disebut dengan PDRB per kapita. PDRB per kapita adalah nilai tambah yang dapat diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas produksi (Sudiharta,2014). Angka PDRB per kapita merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah (Hariwan,2015). Dalam mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi tentunya tidak terlepas dari beberapa upaya yang harus dilaksanakan melalui proses pembangunan.

Menurut Sanggelorang dkk (2015:2), pembangunan merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara berkesinambungan yang berdasar pada kebutuhan masing-masing daerah sehingga akan terwujud perubahan ke arah yang lebih baik sesuai sasaran tujuan pembangunan tersebut. Terkait dengan pembangunan, paradigma yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan

pembangunan manusia, dapat dilihat melalui tingkat kualitas hidup manusia suatu daerah. Maka, dalam menjalani program-program pembangunan diperlukannya kualitas manusia yang baik sehingga sasaran dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dapat tercapai (Sandri,2016).

Aspek pembangunan manusia menjadi salah satu indikator dalam menentukan kemajuan negara atau wilayah. Kemajuan suatu negara atau wilayah tidak hanya diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB), melainkan mencakup kualitas manusia yang terdiri dari aspek pendidikan yang tercermin dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta kesehatan yang tercermin melalui angka harapan hidup masyarakatnya (Laisina dkk, 2015:2). Kualitas manusia dapat menjadi modal dasar bagi proses pembangunan karena dalam proses pembangunan, manusia tidak hanya menjadi subyek melainkan juga menjadi sebagai objek pembangunan.

Dalam mendorong peran manusia dalam proses pembangunan, maka dibutuhkannya investasi untuk mempersiapkan dan menciptakan sumber daya manusia yang produktif, dimana dalam hal ini mengacu pada investasi pendidikan dan kesehatan (Danawati dkk.,2016). Investasi publik menjadi instrumen yang penting dari kebijakan yang tepat sasaran sehingga signifikan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (Milova,2011). Dalam hal ini investasi didapat dari pengeluaran pemerintah, pengeluaran pemerintah dibagi menjadi dua yaitu belanja langsung dan belanja pegawai. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung (belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi

hasil, belanja bantuan keuangan), belanja tidak terduga (Tisnawati,2007). Peran pemerintah dalam pelayanan publik ini sangat penting untuk mengelola anggaran dengan baik agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien dan efektif (Afonso dkk., 2005). Indeks Pembangunan Manusia adalah salah satu hal yang mendasari pembangunan untuk mencapai kesejahteraan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan (Adelfina,2016). Indikator untuk pengukuran IPM adalah angka harapan hidup untuk kesehatan (Sugiantari,2013), angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah untuk pendidikan dan Produk Nasional Bruto (PNB) perkapita untuk ekonomi.

Investasi sumber daya manusia (*human investment*) dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan mempengaruhi produktivitas masyarakat (Dewi, 2014). Kemajuan suatu daerah dapat diukur berdasarkan indikatornya yang utama yakni pendidikan. Apabila tingkat pendidikan masyarakat tinggi, maka semakin besar peluang masyarakat masuk ke dalam dunia kerja. Dengan pendidikan yang tinggi, masyarakat mampu untuk meningkatkan pendapatan yang lebih tinggi melalui peningkatan produktivitas. Pendidikan adalah salah satu aspek penting bagi proses pembangunan karena berkenaan dengan pengetahuan dan keterampilan manusia (Purnami,2016). Hampir setiap negara memprioritaskan pembangunan pendidikan dalam program pembangunan nasional karena hal terpenting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan suatu negara adalah tersedianya penduduk yang terdidik dalam segi kuantitas yang memadai dan kualitas yang baik. Pembangunan pendidikan dari tingkat daerah hingga nasional harus dapat menjamin

peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan pendidikan guna menghadapi tantangan kedepan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan baik lokal maupun nasional (Isti, 2012:2).

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, hal ini termuat dalam Peraturan Pemerintah No.48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Pengalokasian anggaran pendidikan ini menjadi hal penting karena pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi (Treena Wu,2013). Pendidikan merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia. Tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan karena pendidikan merupakan suatu komponen utama dalam lingkaran setan kemiskinan (Silva, 2008). Salah satu cara untuk mengatasinya adalah melalui perbaikan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi (Owolabi,2010).

Sektor kesehatan juga merupakan hal yang penting dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia akan kesehatan meliputi perbaikan gizi dan pelayanan kesehatan yang dimana merupakan hak bagi tiap warga negara yang dilindungi Undang-Undang Dasar (Bhakti, 2014). Perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera (*welfare society*). Tingkat kesehatan masyarakat

akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (Adjasi dan Osei, 2007).

Menurut David (2009), kesehatan menjadi prediktor awal dibanding pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena kondisi kesehatan dianggap cenderung berperan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Besar anggaran kesehatan yang dikeluarkan pemerintah pusat minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji, hal ini dicantumkan dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Menurut Yefriza (2015), pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan menjadi faktor penting dalam penurunan angka kematian bayi dan anak serta peningkatan angka harapan hidup.

Dalam suatu negara atau wilayah, aspek pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang paling mendasar. Menurut Meier dan Rauch dalam (Laisina, dkk; 2015:2), modal manusia yang mencakup pendidikan dan kesehatan sangat berkontribusi positif terhadap pembangunan. Bagi negara berkembang, pendidikan mempunyai peran untuk mencapai terciptanya pembangunan dan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan pengembangan kapasitas melalui penyerapan teknologi-teknologi modern (Todaro, 2006). Menurut Martin *et al* (2014), di negara maju seperti Amerika Serikat, bahkan setengah dari seluruh pertumbuhan ekonominya dapat dikaitkan dengan adanya peningkatan pada sisi kesehatan dimana

setiap tahun peningkatan status kesehatan dapat mencerminkan tambahan pendidikannya.

Pendidikan dan kesehatan yang baik ditunjang oleh peran pemerintah dalam berinvestasi terhadap pendidikan dan kesehatan melalui anggaran pendidikan dan kesehatan, investasi tersebut dapat dilihat dari alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan melalui anggaran pembiayaan pemerintah yang terdapat dalam APBN.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu kebijakan fiskal pemerintah yang digunakan dalam mengelola perekonomian suatu daerah. Sama halnya sebagaimana kondisi yang ada pada daerah, dengan penerapan desentralisasi fiskal pemerintah daerah juga mempunyai anggaran biaya yang diwajibkan untuk dialokasikan dan dikelola dengan baik untuk segala pembangunan di daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Narindra,2016).

Anggaran pemerintah atas pendidikan dan kesehatan merupakan suatu investasi terhadap pertumbuhan ekonomi karena pendidikan dan kesehatan merupakan modal dasar manusia sebagai pelaku pembangunan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi (Anggaryani,2013). Dengan modal dasar yaitu pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, maka peningkatan pertumbuhan ekonomi mudah dicapai. Pertumbuhan ekonomi selalu berhubungan dengan para pelaku ekonomi yaitu pemerintah yang berperan dalam instrumen kebijakan fiskal. Melalui hal tersebut, berarti bahwa pemerintah memiliki peran dalam menentukan besaran pembiayaan/pengeluaran yang dianggap tepat untuk menghasilkan sumber daya

manusia yang berkualitas (Badrudin,2011). Berikut ini merupakan investasi pemerintah Provinsi Bali melalui pembiayaan pada sektor pendidikan tahun 2011–2015 per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali:

**Tabel 1. Anggaran Perkapita di Sektor Pendidikan Tahun 2011-2015 Per Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali (dalam ribu rupiah)**

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Jembrana	570	816	1,020	1,061	1,135
Tabanan	880	958	1,073	1,186	1,336
Badung	880	1,070	974	1,140	1,137
Gianyar	823	882	967	932	1,112
Klungkung	1,118	1,231	1,251	1,300	1,848
Bangli	967	926	1,059	1,133	1,445
Karangasem	823	900	1,081	1,204	1,341
Buleleng	843	838	1,060	1,249	1,246
Denpasar	673	690	413	468	640

*Sumber:* DJPK Kemenkeu.go.id, 2011-2015 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwa pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan di setiap Kabupaten/Kota mengalami fluktuasi, pada beberapa kabupaten mengalami penurunan pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan. Sebagai contoh di Kabupaten Badung, sebelumnya di tahun 2012 pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan sebesar 1,070 ribu rupiah, sedangkan di tahun 2014 sebesar 974 ribu rupiah. Kemudian di Kabupaten Gianyar, sebelumnya di tahun 2013 pembiayaan pemerintah sebesar 967 ribu rupiah, sedangkan di tahun 2014 turun menjadi 932 ribu rupiah.

Kondisi demikian menggambarkan bahwa pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan terjadi penurunan hanya di beberapa kabupaten/kota pada tahun tertentu, berbeda halnya dengan pembiayaan pemerintah di sektor kesehatan.



Berikut ini merupakan tabel yang menggambarkan kondisi pembiayaan pemerintah di sektor kesehatan:

**Tabel 2. Anggaran Perkapita di Sektor Kesehatan Tahun 2011-2015 Per Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali (dalam ribu rupiah)**

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Jembrana	230	284	338	392	400
Tabanan	272	328	414	455	523
Badung	255	438	362	774	538
Gianyar	225	218	289	328	393
Klungkung	333	387	496	812	798
Bangli	268	334	343	371	568
Karangasem	125	302	325	296	345
Buleleng	170	188	262	197	446
Denpasar	231	272	220	269	269

*Sumber:* DJPK Kemenkeu.go.id 2011-2015 (data diolah)

Berdasarkan tabel 2 diatas, anggaran pembiayaan pemerintah di sektor kesehatan tahun 2011-2015 per kabupaten/kota di Provinsi Bali berfluktuasi, beberapa kabupaten dalam tahun tertentu mengalami penurunan seperti Kabupaten badung pada tahun pada tahun 2014 pembiayaan pemerintah di sektor kesehatan sebesar 774 ribu rupiah sedangkan pada tahun 2015 menjadi 538 ribu rupiah, serta Kabupaten Buleleng di tahun 2013 anggaran kesehatannya sebesar 262 ribu rupiah pada tahun 2014 menjadi sebesar 197 ribu rupiah.

Adanya penurunan anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan disebabkan oleh beberapa factor diantaranya, pertama, karena penurunan jumlah APBD. Kedua, penyerapan anggaran tahun sebelumnya tidak sesuai target, yang selanjutnya karena memang pada tahun tertentu pemerintah daerah tidak melakukan pembangunan atau kegiatan yang membutuhkan dana besar. Jumlah anggaran

pendidikan dan kesehatan tersebut kembali kepada kebutuhan daerah masing-masing dan pemerintah daerah pun memiliki alasan tersendiri untuk menganggarkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah itu sendiri.

Dilihat dari nominal jumlah yang dianggarkan masing-masing kabupaten/kota nampak bahwa anggaran pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan masih mengalami ketimpangan antar wilayah sehingga kondisi ini memicu terjadi perbedaan dalam hal fasilitas atau sarana dan prasarana dalam menunjang peningkatan kesehatan yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia di Provinsi Bali.

Melalui latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini diantaranya: (a) bagaimana pengaruh pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks kualitas manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2011-2015? (b) bagaimana pengaruh pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan serta indeks kualitas manusia terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2011-2015? (c) bagaimana pengaruh pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indeks kualitas manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2011-2015?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai antara lain: (a) untuk menganalisis pengaruh pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks kualitas manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2011-2015, (b) untuk menganalisis pengaruh pembiayaan

pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan serta indeks kualitas manusia terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2011-2015, dan (c) untuk menganalisis pengaruh pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indeks kualitas manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2011-2015.

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi media untuk menerapkan konsep dan teori yang selama ini diperoleh dalam perkuliahan tentang pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan, rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, angka harapan hidup dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan melalui berbagai temuan pada penelitian. Sedangkan secara praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan, indeks kualitas manusia, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, serta kedepannya dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dalam meneliti pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan dalam menunjang peningkatan indeks kualitas manusia dan pertumbuhan ekonomi.

Hipotesis yang dapat dibentuk adalah pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh terhadap indeks kualitas manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan serta indeks kualitas manusia berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan

dan kesehatan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indeks kualitas manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

## **METODE PENELITIAN**

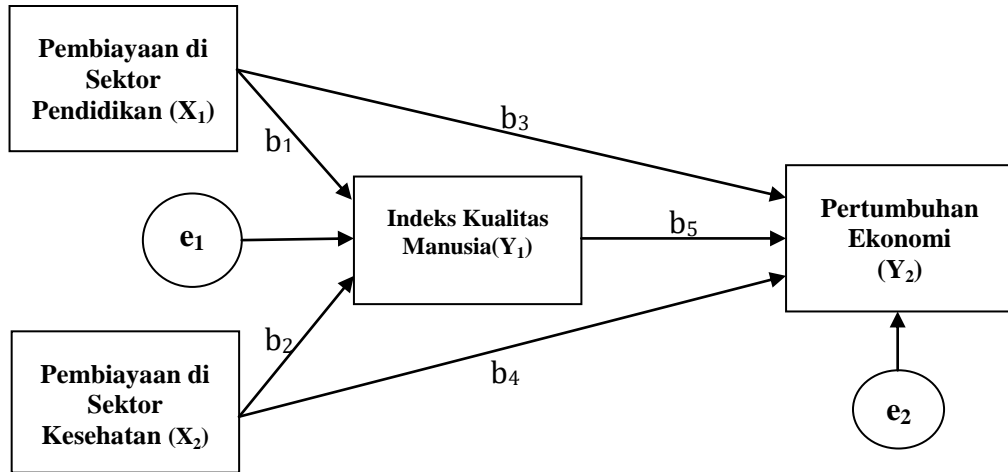
Penelitian ini berlokasi di kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Bali. Dipilihnya lokasi ini karena Bali masih memiliki masalah dari segi ketimpangan pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan antar daerahnya sehingga adanya perbedaan penyediaan sarana dan prasarana untuk kedua sektor tersebut yang dapat berdampak kepada pertumbuhan ekonomi Bali belum dapat dicapai secara maksimal. Menurut jenisnya, dalam penelitian ini menggunakan data data kualitatif dan data kuantitatif. Sedangkan berdasarkan sumbernya menggunakan data sekunder.

Metode observasi non partisipan merupakan metode yang dipilih dalam pengumpulan data yang dilakukan, yang terdiri dari: mempelajari, mencatat, mengamati uraian buku literatur, karya ilmiah berupa jurnal dan skripsi, artikel, serta dokumen – dokumen yang terdapat dari instansi terkait seperti BPS Provinsi Bali, Direktorat Jendral Perimbangan dan Keuangan, *browsing*, dan literatur tentang pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan, rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, angka harapan hidup serta pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Teknik analisis jalur (*path analysis*) merupakan teknik analisis yang digunakan dalam menguji pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini. *Path Analysis* berguna untuk memperlihatkan dan menguji model keterkaitan yang berbentuk sebab akibat antar

variabel (Suyana Utama, 2012:156). Pengujian hubungan variabel yang digunakan didasarkan teori yang menyatakan memiliki hubungan secara kausal.

**Gambar 1 Model Analisis Jalur**



Berdasarkan Gambar 1. dapat dibuat persamaan struktural yang menunjukkan hubungan antar variabel yang dihipotesiskan sebagai berikut:

$$Y_1 = b_1X_1 + b_2X_2 + e_1 \dots \dots \dots (1)$$

$$Y_2 = b_3X_1 + b_4X_2 + b_5Y_1 + e_2 \dots \dots \dots (2)$$

- Keterangan:  
 Y<sub>1</sub> = Indeks Kualitas Manusia  
 Y<sub>2</sub> = Pertumbuhan Ekonomi  
 X<sub>1</sub> = Pembiayaan Pemerintah di Sektor Pendidikan  
 X<sub>2</sub> = Pembiayaan Pemerintah di Sektor Kesehatan  
 e<sub>1</sub>,e<sub>2</sub> = Variabel pengganggu  
 b<sub>1</sub>,b<sub>2</sub>,b<sub>3</sub>,b<sub>4</sub>,b<sub>5</sub> = koefisien dari masing-masing variabel

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan melalui dua tahap, yaitu: (a) pengujian pengaruh langsung, yaitu menguji pengaruh langsung pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks kualitas manusia, pengaruh langsung pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan serta

indeks kualitas manusia terhadap pertumbuhan ekonomi serta (b) Pengaruh tidak langsung variabel pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pertumbuhan ekonomi melalui variabel indeks kualitas manusia. Hasil pengujian persamaan struktural 1 dan persamaan struktural 2 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

**Tabel 3. Hasil Ringkasan Koefisien Jalur dan Signifikansi Hubungan Antarvariabel**

Regresi	Koef. Reg. Standar	Standar Error	T. Hitung	P. Value	Keterangan
X1 → Y1	0,253	0,077	2,187	0,034	Signifikan
X2 → Y1	0,596	0,270	5,155	0,000	Signifikan
X1 → Y2	0,217	0,064	2,609	0,013	Signifikan
X2 → Y2	0,337	0,273	3,339	0,002	Signifikan
Y1 → Y2	0,525	0,122	5,081	0,000	Signifikan

Sumber: Data diolah, 2016

Hasil pengujian pada Tabel 3 memperlihatkan bahwa pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan memiliki pengaruh langsung terhadap indeks kualitas manusia, diperoleh nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,253 dan nilai probabilitas sebesar  $0,034 < 0,05$  ini berarti  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima, artinya pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan ( $X_1$ ) memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap indeks kualitas manusia ( $Y_1$ ). Hubungan positif dan signifikan antara variable pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan terhadap indeks kualitas manusia yang diperoleh dalam penelitian ini menggambarkan bahwa anggaran pendidikan mampu meningkatkan kualitas manusia. Teori Meier, et al (Winarti, 2014: 41) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dapat berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah penduduk

yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ketingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi. Pengetahuan yang tinggi dan pemahaman terhadap keterampilan tersebut dapat meningkatkan kualitas manusia.

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 3 pengaruh langsung antara pembiayaan pemerintah di sektor kesehatan terhadap indeks kualitas manusia diperoleh nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,596 dan nilai probabilitas sebesar  $0.000 < 0.05$  ini berarti  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima, artinya pembiayaan pemerintah di sektor kesehatan ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks kualitas manusia ( $Y_1$ ). Hubungan positif dan signifikan antara variabel pembiayaan pemerintah di sektor kesehatan terhadap indeks kualitas manusia menunjukkan bahwa anggaran pemerintah di sektor kesehatan mampu memberikan dampak positif dalam peningkatan kualitas manusia karena dengan peningkatan anggaran kesehatan, maka fasilitas kesehatan yang tersedia juga mengalami peningkatan (Astri, 2013). Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *human capital* (Todaro, 2006), yang menyimpulkan bahwa status kesehatan yang relatif baik dibutuhkan oleh manusia untuk menopang semua aktifitas hidupnya. Maka, untuk mencapai kondisi kesehatan yang baik, dibutuhkan sarana kesehatan yang memadai guna peningkatan kualitas hidup. Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Citra (2012), dimana

kesehatan berpengaruh signifikan dan positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya meningkatkan produktifitas.

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 3 pengaruh langsung pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi, diperoleh nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,217 dan nilai probabilitas sebesar  $0,013 < 0,05$  ini berarti  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima, artinya pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ). Hubungan positif dan signifikan variabel pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa anggaran pemerintah di sektor pendidikan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian oleh Brata *et al* (2004), Todaro *et al* (2006), Owolabi (2010), Hongyi-lie dan Huan-Liang (2013), Meylina dkk (2013), Manday *et al* (2014) yang menyatakan bahwa pengeluaran untuk pendidikan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan pendapat Todaro *et al* (2006) bahwa pendidikan sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital serta memiliki kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Implikasi dari temuan tersebut yakni meningkatnya belanja pemerintah di sektor pendidikan terbukti mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas pembangunan manusia. Anggaran yang besar untuk sektor pendidikan memberikan peluang yang sangat besar kepada seluruh masyarakat untuk dapat mengakses pendidikan dengan baik. Ketika selama ini pendidikan masih dianggap mahal sehingga sulit dijangkau oleh



masyarakat, dengan adanya program-program pendidikan gratis yang dibiayai atau difasilitasi oleh pemerintah, maka semua masyarakat memiliki akses terhadap layanan pendidikan.

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 3 pengaruh langsung pembiayaan pemerintah di sektor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi, diperoleh nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,337 dan nilai probabilitas sebesar  $0,002 < 0,05$  ini berarti  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima, artinya pembiayaan pemerintah di sektor kesehatan ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ). Hubungan pembiayaan pemerintah di sektor kesehatan menunjukkan hasil yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan bahwa pembiayaan pemerintah di sektor kesehatan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Ilyas, dkk. (2014), dimana pembiayaan pemerintah di sektor kesehatan akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik sehingga harapan kedepannya tercipta lebih banyak sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut akan mendorong meningkatnya produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya akan menciptakan perbaikan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, hasil penelitian Cheng dan Lai (1997). serta Ghalia (1997) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan, dimana hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran yang dilakukan pemerintah mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Dari hasil olahan data mengenai pengaruh pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan yang dalam hal ini dapat digolongkan sebagai pengeluaran pemerintah, keduanya menunjukkan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sejalan dengan hasil studi oleh Loizides (2005), Sinha (1998), Jiranyakul (2007), dan Dogan (2006) yang menyatakan bahwa adanya hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi dan tidak terdapat hubungan kausalitas. Hal ini berarti bahwa besarnya pengeluaran pemerintah mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 3 pengaruh langsung indeks kualitas manusia terhadap pertumbuhan ekonomi, diperoleh nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,525 dan nilai probabilitas sebesar  $0.000 < 0.05$  ini berarti  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima, artinya indeks kualitas manusia ( $Y_1$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ). Hubungan indeks kualitas manusia menunjukkan hasil yang positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan bahwa kualitas manusia yang meningkat mampu berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Menurut Lim (1996), dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Jepang dan Korea Selatan disebabkan oleh sumber daya manusia yang berkualitas, hal ini berdasar pada dengan kualitas manusia yang baik, maka memudahkan dalam menyerap dan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan ekonomi yang terjadi serta peningkatan pada produktivitasnya, sehingga mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Terdapat indikator pengecekan validitas model yaitu dengan koefisien determinasi total yang hasilnya menunjukkan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 R_m^2 &= 1 - (Pe_1)^2(Pe_2)^2 \\
 &= 1 - (0,748)^2(0,504)^2 \\
 &= 0,858
 \end{aligned}$$

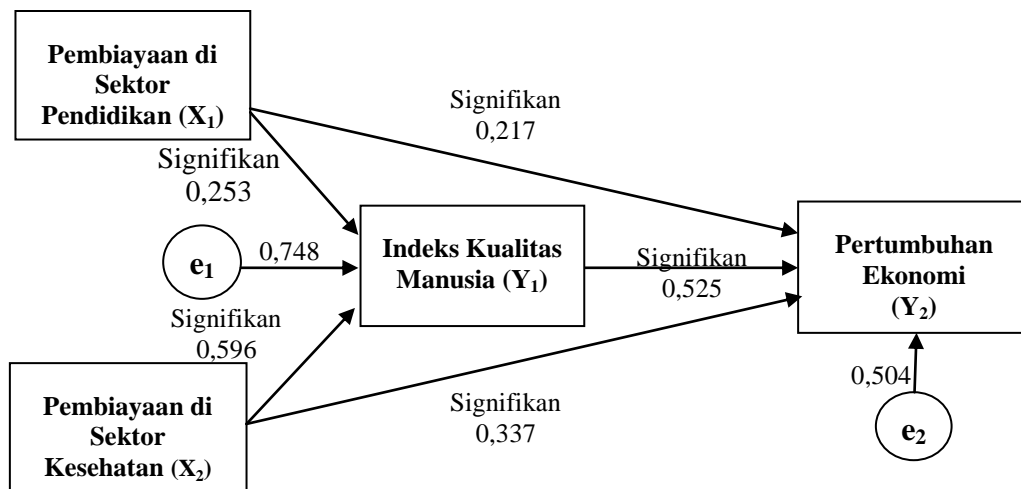
Keterangan :

$R_m^2$  : Koefisien determinasi total  
 $e_1, e_2$  : Nilai kekeliruan taksiran standar

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi total, maka diperoleh bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model adalah sebesar 85,8 persen atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data sebesar 85,8 persen dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya yaitu 14,2 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model.

Berdasarkan ringkasan koefisien jalur di atas maka dapat dibuat diagram jalur seperti dibawah ini:

**Gambar 2 Diagram Hasil Analisis Jalur**



**Tabel 4. Hasil Ringkasan Pengaruh Tidak Langsung**

Pengaruh Antarvariabel	Variabel Mediasi	Z	Keterangan
X1 → Y2	Y1	2,609	Signifikan
X2 → Y2	Y1	1,968	Signifikan

*Sumber:* Data dioalah, 2016

Berdasarkan Tabel 4 nilai Z hitung sebesar  $2,609 > |1,96|$ . Artinya indeks kualitas manusia ( $Y_1$ ) merupakan variabel intervening dalam pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan ( $X_1$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ) di Provinsi Bali atau dapat dikatakan pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indeks kualitas manusia.

Berdasarkan Tabel 4 nilai Z hitung sebesar  $1,968 > |1,96|$ . Artinya indeks kualitas manusia ( $Y_1$ ) merupakan variabel intervening dalam pembiayaan pemerintah di sektor kesehatan ( $X_2$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ) di Provinsi Bali atau dapat dikatakan pembiayaan pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indeks kualitas manusia.

#### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pemaparan hasil analisis diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut: (a) Pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan dan positif terhadap indeks kualitas manusia, (b) Pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan serta indeks kualitas manusia memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, serta (c) Pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan memiliki

pengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indeks kualitas manusia.

Dengan mengamati hasil analisis dan simpulan yang telah dipaparkan, maka dapat diajukan beberapa saran diantaranya: (a) berkaitan dengan pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan, diharapkan pemerintah mampu mengalokasikan anggaran yang tersedia di masing-masing daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung di sektor pendidikan dan kesehatan di masing-masing daerah kabupaten/kota secara merata sehingga setiap lapisan masyarakat mampu mendapat akses ke sektor pendidikan dan kesehatan, dimana nantinya dapat dihasilkannya sumber daya manusia yang berkualitas, (b) anggaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan juga perlu dialokasikan untuk pengadaan atau bahkan penciptaan alat-alat yang mengedepankan teknologi guna menghasilkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan yang tercermin dari mudah beradaptasinya sumber daya manusia terhadap kondisi dan teknologi sesuai perkembangan zaman serta tercapainya peningkatan produktivitas yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, serta (c) Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan masih terdapat variabel-variabel lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di luar model sebesar 14,2 persen. Pada penelitian selanjutnya disarankan agar objek penelitian diperluas dengan menambah variabel-variabel yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.

## REFERENSI

- Adelfina dan I Made Jember. 2016 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kota Provinsi Bali Periode 2005–2013. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol.5. No.10 Oktober 2016. ISSN: 2303-0178
- Adjasi, Charles K.D. dan Kofi A. Osei. 2007. Proverty Profile and Correlates of Proverty in Ghana. *International Journal of Social Economics*. Volume 34, No. 7.
- Afonso, Antonio dan Miguel St. Aubyn. 2005. Non-Parametric Approaches to Education and Health Efficiency in OECD Countries. *Journal of Applied Economics*. Volume VIII, No. 2 November 2005.
- Anggaryani, Putri. 2013. Pengaruh Tenaga Kerja dan Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1980-2012. *Jurnal Ilmiah*. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang.
- Astri, M. S. Nikensari dan Kuncara. 2013. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dna Bisnis*. Volume 1 No. 1.
- Badrudin, Rudy. 2011. Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Pembangunan*. ISSN: 1410-2293. Volume 9, Nomor 1, April 2011.
- Bhakti, Nadia Ayu. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2008-2012. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. ISSN: 1411-0393 Volume 18, Nomer 4, Desember 2014.
- BPS Provinsi Bali. 2011. Bali Dalam Angka 2011. Provinsi Bali  
\_\_\_\_\_. 2012. Bali Dalam Angka 2012. Provinsi Bali  
\_\_\_\_\_. 2013. Bali Dalam Angka 2013. Provinsi Bali  
\_\_\_\_\_. 2014. Bali Dalam Angka 2014. Provinsi Bali  
\_\_\_\_\_. 2015. Bali Dalam Angka 2015. Provinsi Bali

- \_\_\_\_\_.2016. Denpasar Dalam Angka 2016.Provinsi Bali
- Brata, Aloysius Gunadi. 2004. Analisis Hubungan Timbal Balik Antara Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Daerah Tingkat II Di Indonesia. Yogyakarta: Lembaga Penelitian-Universitas Atmajaya.
- Cheng, Benjamin S. and Lai, Tin Wei.1997.Goverment Expenditures and Economic Growth in South Korea: A Var Approach. *Journal of Economic Development*, Volume 22 Number 1.
- Citra, Ramayani. 2012. Analisis Produktifitas dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Tesis Magister Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- David, Ben-Nissim.2009.Economic Growth And Its Effect On Public Health. *International Journal of Social Economics*. Volume 36 Number 3.
- Danawati, Sri dkk. 2016. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*. Volume 5 No. 7. ISSN: 2337-3067
- Dewi, Nyoman Lilya Santika dan I Ketut Sutrisna. 2014. Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali.*E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Volume. 3, No. 3. Universitas Udayana
- Dewi, Feby Shinta dkk. 2017. Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Perkapita dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Inflasi Kota Denpasar Periode Tahun 1994-2013. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Volume 6, No.1, Januari 2017. ISSN: 2303-0178
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia. Anggaran Pendidikan menurut Fungsi 2010-2015. [www.djpk.go.id](http://www.djpk.go.id). Diakses tanggal 2,bulan Juli, tahun 2016.
- Dogan, Ergun and Tang, Tuck Cheong.2006.Goverment Expenditure and National Income: Causality tests for Five South East Asian Countries. *International Bussiness and Economics Research Journal*.
- Ghalia, Khalifa H.1997.Goverment Spending and Economic Growth in Saudi Arabia. *Journal of Economic Development*. Volume 22 Number 2.

- Hariwan, Peggy dan Ayu Swaningrum. 2015. Analisis Indeks Pembangunan Manusia Pada 5 Wilayah Hasil Pemekaran di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Volume 8, No. 1 Februari 2015. ISSN: 2301-8968
- Hongyi-Lie dan Huan-Liang.2010. Health, Education and Economic Growth InEast Asia.*Jurnal Of Chinese Economic And Foreign Trade Studies*.Volume 3, No.2, 2010. Emerald Group Publishing Limited 1754-4408DOI.
- Ilyas. 2014. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap IPM dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sinjai. *Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi*. Universitas Hassanudin.
- Isti, Nurwidayanti. 2012. Hambatan Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan Pelaksanaan Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Di SMA Se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Jiranyakul, Komain.2007.The Relationship Between Government Expenditures and Economic Growth in Thailand. *Journal of Economics and Economic Education Research*. Volume 8 Number 1.
- Laisina dkk. 2015. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan terhadap PDRB Melalui Indeks Pmebangunan Manusia di Sulawesi Utara Tahun 2002-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Volume 15 No. 14 Tahun 2015.
- Lim, David. 1996. Explaining Economic Growth: A New Analytical Framework. Vermont:Edward Elgar Publish.Co
- Loizides, John and Vamvoukas, George.2005.Goverment Expenditure and Economic Growth: Evidence from Trivariate Causality Testing. *Journal of Applied Economics*. Volume 8, Number 1.
- Martin. Greg *et al*.2014.Global Health Funding and Economic Development. *Journal Glabalization and Health*. Volume 8 No.8.
- Manday, Robinson O. et al.2014.Government Expenditures and Economic Growth: The Nigerian Experience. *Mediterranean Journal of Social Sciences MC SER Publishing*. Volume 5 No 10 June 2014, Rome-Italy.
- Meylina, dkk. 2013. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indek Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*.Volume 1. No.1.2013.



- Milova, Olta. 2011. Public Spending Effect on Economic Growth in Albania. *China-USA Business Review*. ISSN 1537-1514. Volume 10 No.5.
- Narindra, A A Ngr Mayun dan I Ketut Jati. 2016. Indeks Pembangunan Manusia Memoderasi Pengaruh Kinerja Kapasitas Fiskal Daerah dan Silpa Pada Daya Saing Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Volume 14, No.2 Februari 2016. ISSN: 2302-8556
- Oluwatobi, Stephen O & Ogunrinola, I Oluranti. 2011. Government Expenditure on Human Capital Development: Implications for Economic Growth in Nigeria. *Journal of Sustainable Development*. Volume: 4 Edisi: 3
- Owolabi, et al. 2010. A Quantitative Analysis of the Role of Human Resource Development in Economic in Nigeria. *European Journal of Economic, Finance and Administrative Sciences*.
- Peraturan Pemerintah No.48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Purnami, Ni Made Sasih dan Ida Ayu Nyoman Saskara. 2016. Analisis Pengaruh Pendidikan dan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Jumlah Penduduk Miskin. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol.5, No.11 November 2016. ISSN: 2303-0178
- Sandri, Ni Ketut. 2016. Kemampuan Alokasi Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*. Vol. 21, No. 1, Februari 2016.
- Sanggalorang, Septiana. 2015. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Volume 15 no. 02-Edisi Juli 2015. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi UNSRAT. Manado
- Silva, Indunil De. 2008. Micro-Level Determinant of Proverty in Sri Lanka: a Multivariate Approach. *International Journal of Social Economics*. Volume 35, No. 3.
- Sinha, Dipendra. 1998. Government Expenditure and Economic Growth in Malaysia. *Journal of Economic Development*. Volume 23 Number 2.
- Sudiharta, Putu Seruni Pratiwi dan I Ketut Sutrisna. 2014. Pengaruh PDRB Per Kapita, Pendidikan, dan Produktivitas Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol. 3, No. 10, Oktober 2014. ISSN: 2303-0178

- Sugiantari, Ayuk Putri dan I Nyoman Budiantara. 2013. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Angka Harapan Hidup di Jawa Timur Menggunakan Regresi Semiparametrik Spline. *Jurnal Sains Dan Seni Pomits Vol. 2, No.1*. Jurusan Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
- Sukirno, Sadono. 2000. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan Pembangunan*. UI-Press. Jakarta.
- Suyana., Made. 2012. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Denpasar.
- Tisnawati, Ni Made. 2007. Analisis Pengeluaran Pemerintah Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*. Volume 2, No. 1.
- Treena Wu. 2013. Constrains to Human Capital Investment in Developing Countries: Using The Asian Financial Crisis in Indonesia as a Natural Experiment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Volume 49, No. 1, 2013. ISSN: 1472-7234
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ketujuh, Jilid 1. (Terjemahan Aris Munandar). Jakarta: Erlangga
- Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Winarti, Astri. 2014. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan dan PDB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Periode 1992-2012. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Yefriza. 2015. Managing Public Health Expenditure in Indonesia. *Bulletin of Indonesia Economic Studies*. Volume 51, No.1. 2015. ISSN: 1472-7234